



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

RINGKASAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, menggunakan Sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami beserta Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya. Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025, agar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 13 Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

**DAFTAR ISI****RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DASAR HUKUM	1
VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	4
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	10
DATA GEOGRAFIS WILAYAH	19
INFORMASI UMUM DATA KEPENDUDUKAN	22
1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	25
2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	26
3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025	35
4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	37
5. INOVASI DAERAH	41
6. PENUTUP	64
DAFTAR PENGHARGAAN	66



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

a. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran



- Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 18);
 20. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33).

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel merupakan provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah :

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibu kota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.



Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran :



- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM.
- 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan.
- 3) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan.
- 4) Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tujuan 2. Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah.
- 2) Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah.
- 3) Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Tujuan 3. Terwujudnya keterkaitan ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air.

Keterkaitan antara ketahanan pangan, energi dan kedaulatan air saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan pangan diwujudkan melalui tersedianya kebutuhan pangan, dapat diakses dan terjangkau, dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manajemen pengelolaan sumber daya air dilakukan untuk memastikan pasokan air bersih yang cukup.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air.



- 2) Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan).

Tujuan 4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga memastikan kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup di masa depan, utamanya penurunan emisi gas rumah kaca dan timbunan persampahan.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tujuan 5. Meningkatnya kualitas konektivitas daerah

Kualitas infrastruktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa serta meningkatkan aksesibilitas layanan. Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan yang baik memungkinkan distribusi barang jasa menjadi lebih efisien antar daerah, utamanya wilayah desa dan kecamatan. dalam era digitalisasi keberadaan layanan internet sangat penting sehingga akses internet di daerah terpencil perlu ditingkatkan.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas

Tujuan 6. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Peningkatan akses infrastruktur dasar masyarakat di wilayah terpencil sangat penting agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Akses infrastruktur yang baik akan dapat mengurangi beban hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.



Sasaran :

- 1) Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi
- 2) Meningkatkan Akses Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

Tujuan 7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana

Pengelolaan bencana untuk meminimalkan dampak dan risiko bencana terhadap masyarakat, sehingga memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sistem pengelolaan bencana yang baik dilakukan dengan mitigasi bencana dan memperhatikan wilayah-wilayah yang rentan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain lain.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan

Tujuan 8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat

Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja dengan kontribusi UMKM yang cukup sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak. Kesejahteraan sosial diupayakan dengan memperkuat sistem perlindungan sosial yang baik, utamanya bagi masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
- 2) Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (governance) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintah. Peningkatan tata



kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Tujuan 10. Terwujudnya Stabilitas Sosial

Stabilitas sosial sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan mencegah terjadi konflik yang dapat mengganggu kehidupan sosial ekonomi. Harmoni antar kelompok dengan meningkatkan toleransi antar kelompok sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di tengah keragaman sosial, budaya dan agama diperlukan untuk menciptakan rasa saling menghargai sehingga dapat mengurangi potensi konflik.

Sasaran :

- 1) Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
- 2) Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan integratif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang integratif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak hanya mengagendakan aktivitas



pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi dan arah kebijakan daerah memiliki peran yang sangat penting. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
1.	Isu 3 : Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal Isu 1 : Kemiskinan dan <i>stunting</i> masih tinggi	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing	1. Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif	1. Melanjutkan Program Berkat Plus (berobat dengan KTP + rumah singgah)
				2. Mengembangkan program Sumbang Rawat (layanan kesehatan langsung ke rumah warga miskin)
				3. Meningkatkan kualitas kesehatan perempuan dan anak
			2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan
				2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
			3. Meningkatkan akses, partisipasi, dan motivasi masyarakat atau peserta didik dalam menempuh pendidikan	3. Meningkatkan Program Sekolah Gratis yang Berkeadilan
				4. Penguatan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Hidup



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
			4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana dan prasarana pendidikan	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik
				2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Fasilitas Pendidikan
				3. Mengembangkan Kurikulum Berbasis Lokal sesuai potensi daerah
				4. Meningkatkan Tata Kelola dan Sistem Informasi Pendidikan
				5. Meningkatkan kerja sama daerah, perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya dalam riset dan inovasi
			5. Meningkatkan layanan perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional	1. Meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca
2.	Isu 2 : Produktivitas Pertanian dan Hilirasi Komoditi Unggulan Belum Optimal Isu 6 : Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal Isu 7 : Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	Misi 2 : Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.	6. Meningkatkan kualitas kompetensi pemuda	1. Meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca 2. Mendorong lembaga-lembaga berorientasi pertanian untuk melahirkan agripreneur untuk kemajuan daerah.
			1 Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
			2 Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Meningkatkan Akses Permodalan dan Sarana Pertanian
			3 Peningkatan Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari Sektor ESDM	1. Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			4 Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	2. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
			5 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	1. Meningkatkan Produksi Minerba
			6 Peningkatan Ekspor ke Luar Negeri	2. Optimalisasi Tata Kelola mineral dan batubara
			7 Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah	1. Meningkatkan Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
				2. Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				1. Meningkatkan Sistem Informasi Penanaman Modal
				2. Meningkatkan Penguatan Strategi Promosi
				1. Meningkatkan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Ekspor
				2. Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Produk Ekspor
				3. Meningkatkan Akses Pasar Ekspor
				1. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang
				2. Meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
			8 Upaya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	3. Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk
				1. Meningkatkan Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Harga
				2. Meningkatkan Penguatan Sistem Distribusi dan Logistik
			9 Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	3. Meningkatkan Kapasitas dan Ketahanan Pasokan Barang Strategis
				1. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kebijakan Pengendalian Inflasi
			10 Optimalisasi upaya Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan	2. Meningkatkan Kapasitas TPID dalam Analisis dan Perumusan Kebijakan
				1. Meningkatkan Penguatan Peran Perbankan dan Lembaga Keuangan
				2. Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
				3. Meningkatkan Pengembangan Inovasi dan Digitalisasi Keuangan
				4. Meningkatkan Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
3.	Isu 2 : Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal Isu 8 : Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (<i>nexus</i>) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
			2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan	2. Meningkatkan Efisiensi Distribusi dan Rantai Pasok Pangan
				1. Meningkatkan Pengendalian Harga Komoditas Pangan
			3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan	2. Meningkatkan Upaya pengurangan Disparitas Harga Antar wilayah
				1. Meningkatkan Kecukupan Konsumsi Pangan
			4. Peningkatan Ketersediaan Energi	2. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pangan Bergizi dan Berkualitas
				1. Meningkatkan Upaya Efisiensi Energi
				2. Meningkatkan Upaya Peningkatan Konservasi Energi
			5. Peningkatan Aksesibilitas Energi	3. Pengurangan Ketergantungan terhadap Energi Fosil
				1. Meningkatkan Upaya Peningkatan Cakupan Jaringan Distribusi Energi
			6. Peningkatan Keterjangkauan Energi	2. Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Daerah Terpencil
				1. Meningkatkan Upaya Penurunan Harga Energi
				2. Meningkatkan Subsidi dan Insentif energi untuk



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
				Kelompok Rentan
			7. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air	1. Meningkatkan Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis 2. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berkelanjutan 3. Optimalisasi Peran masyarakat dalam Konservasi Tanah dan Air
			8. Peningkatan Pendayagunaan Air	1. Meningkatkan Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Irigasi 3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi
			9. Peningkatan Kemitraan dalam Hilirisasi	1. Meningkatkan Promosi Terkait Potensi Hilirisasi 2. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Mitra Industri
			10. Peningkatan Fasilitas Pendukung Industri Hilir	1. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Fasilitas Pendukung Hilirisasi 2. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi
			11. Peningkatan Daya Saing Produk Hilir	1. Meningkatkan Penguatan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk 2. Meningkatkan Penguatan Riset dan Inovasi Produk
			12. Peningkatan Akses Pasar Produk Hilir	1. Meningkatkan Penguatan Promosi dan Branding Produk 2. Meningkatkan Pengembangan Jaringan Distribusi Produk
			13. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air untuk mewujudkan kedaulatan air di Sumatera Selatan	1. Meningkatkan tata kelola aspek konservasi Sumber Daya Air terutama menurunkan luasan lahan kritis dan menurunkan laju deforestasi pada kawasan Hulu (OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim) 2. Meningkatkan tata kelola aspek pendayagunaan Sumber Daya Air terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, ketahanan pangan, dan industri di 17 Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan tata kelola aspek pengendalian daya rusak air terutama pada



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
				pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan banjir dan longsor di 17 Kabupaten/Kota
				4. Meningkatkan tata kelola pemberdayaan masyarakat dan lembaga dalam pengelolaan sumber daya air di 17 Kabupaten/Kota
				5. Meningkatkan tata kelola sistem informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di 17 Kabupaten/Kota
			14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi Gas Rumah kaca untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut pada kawasan Hulu dan pesisir (OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir dan Musi Banyuasin).
				2. Meningkatkan kualitas air dan udara melalui penerapan baku mutu pencemaran air dan udara berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat, penegakkan hukum lingkungan dan pengawasan dalam penerapan baku mutu pencemaran air dan udara di 17 Kabupaten/Kota
				3. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip keadilan ekologis, dan keadilan bagi generasi mendatang di 17 Kabupaten/Kota
				4. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang kuat dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang sehat di 17 Kabupaten/Kota
4.	Isu 4 : Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal Isu 5 : Mitigasi Bencana	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	1. Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi	1. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan kewenangan Provinsi di 16 Kabupaten/Kota kecuali Kota Prabumulih 2. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur simpul transportasi darat (Terminal tipe B di Lubuk linggau, Palembang, Musi Banyuasin,



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
	Kebakaran Hutan Lahan Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal		Sumatera Selatan	Ogan Ilir, OKU Timur dan OKU Selatan)
				3. Mewujudkan pembangunan pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin
				4. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur integrasi multi moda angkutan umum (Metropolitan Patungraya Agung)
				5. Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur keselamatan transportasi darat dan sungai
				6. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota.
				7. Mendorong beroperasionalnya jalan khusus angkutan batubara
			2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.	1. Mendorong kerjasama antar daerah dalam rangka penyediaan air minum skala regional (Metropolitan Patungraya Agung)
				2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Akses Air Minum di 17 Kabupaten/Kota
				3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Akses Pengelolaan Air Limbah di 17 Kabupaten/Kota
				4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Persampahan di 17 Kabupaten/Kota
				5. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan, serta lingkungan di Kawasan strategis Daerah Provinsi dan kawasan prioritas di 17 Kabupaten/Kota
				6. Memberikan hunian yang layak bagi masyarakat antara lain dengan melanjutkan program bedah rumah guna memberikan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu, mendukung program penyediaan 3 juta rumah di 17 Kabupaten/Kota



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
			3. Meningkatkan kualitas tata kelola bencana dan ketahanan daerah	7. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pedesaan di 14 Kabupaten/Kota
				1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana di 17 Kabupaten/Kota
				2. Meningkatkan penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di 17 Kabupaten/Kota
				3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, serta meningkatkan desa tangguh bencana di 17 Kabupaten/Kota
5.	Isu 1 : Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi	Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan	1. Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja	1. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, permodalan, dan kemudahan berusaha 2. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja 3. Meningkatkan kerja sama pemerintah dan pelaku bisnis untuk melahirkan pemula usaha serta peningkatan iklim investasi dengan kemudahan birokrasi 4. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pendukung usaha seperti transportasi, listrik, dan internet 5. Meningkatkan kemampuan pemasaran dan branding pelaku usaha, khususnya UMKM, agar produk dan layanan mereka lebih kompetitif dan dikenal luas 6. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha.
			2. Memperkuat Perlindungan Sosial yang Terintegrasi dan Berkesinambungan	1. Mengembangkan Sistem Informasi Terpadu serta mengoptimalkan DT SEN sebagai basis data penyaluran bantuan 2. Meningkatkan Kapasitas Institusional melalui pelatihan SDM pelayanan sosial 3. Meningkatkan dan memperluas akses layanan sosial bagi semua kelompok rentan (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
			3. Meningkatkan Intervensi Terpadu untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting	4. Memperkuat peran komunitas (masyarakat) dalam perlindungan sosial
				5. Mendorong kebijakan untuk peningkatan upah minimum regional yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah
				1. Meningkatkan kualitas program pengurangan beban penduduk miskin
				2. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas dan integrasi program untuk pemberdayaan penduduk miskin
				3. Mendorong percepatan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
				4. Meningkatkan Koordinasi Multisektoral melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi.
				5. Meningkatkan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting
				6. Meningkatkan implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif
				1. Meningkatkan transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan <i>cyber</i> dan pengembangan sumber daya manusia digital
				2. Melakukan percepatan reforma agrarian tingkat daerah
6.	Isu 9 : Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	1. Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	3. Memperluas pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi
				4. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE)
				1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik
				2. Melakukan peningkatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum
			2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital	3. Memperluas peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik
				4. Mendorong dan menjamin keterbukaan informasi publik



NO	ISU STRATEGIS	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	STRATEGI
1	2	3	4	5
				terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil
			3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	1. Meningkatkan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terutama untuk pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan di 17 Kabupaten/Kota 2. Meningkatkan transformasi digital melalui pengembangan jaringan, keamanan <i>cyber</i> dan pengembangan sumber daya manusia digital di 17 Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan satu data melalui pengelolaan data berbasis spasial dan non spasial untuk mendukung pembangunan di 17 Kabupaten/Kota
7.	Isu 9 : Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial	Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal	1. Penguatan Identitas Budaya dan Moderasi Keagamaan 2. Revitalisasi Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait fungsi Rumah Tahfiz sebagai basis pendidikan agama bagi anak-anak 2. Melakukan pengembangan toleransi kehidupan beragama 3. Mendorong Pembangunan Sarana dan Prasarana Budaya dan Agama dalam penguatanmoderasi beragama dan pengembangan seni budaya lokal 1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan melalui program penguatan Pancasila, nilai-nilai simbur cahaya, dan kearifan lokal 2. Melakukan revitalisasi seni budaya melalui aksara ulu sebagai identitas budaya Sumatera Selatan 3. Mendorong pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Sumsel (ISBI Sumsel)

d. Data Geografis Wilayah

Pada Tahun 1950 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan telah dibentuk Provinsi Otonomi Sumatera Selatan, yang wilayahnya meliputi Daerah Keresidenan Palembang,



Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung dengan Ibu kotanya berkedudukan di Kota Palembang.

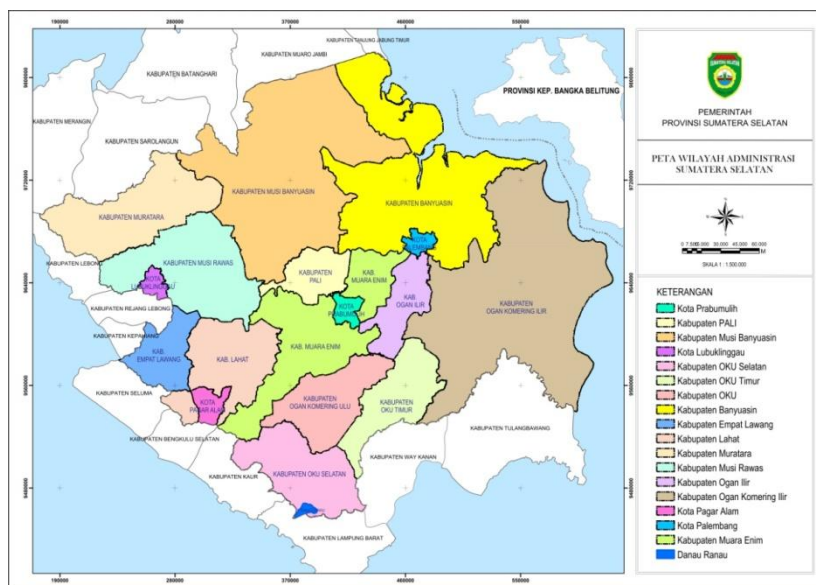
Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tanggal 26 Juni 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang.

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1° - 4° Lintang Selatan dan 102° - 106° Bujur Timur dengan batas administrasi:

- Di sebelah Utara dengan Provinsi Jambi.
- Di sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
- Di sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
- Di sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu.

Adapun peta administrasi Provinsi Sumatera Selatan seperti tertera pada gambar berikut :

Gambar
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan





Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 Km² dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Luas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH KM²
1	OGAN KOMERING ULU	4.797,06
2	OGAN KOMERING ILIR	18.359,04
3	MUARA ENIM	7.383,90
4	LAHAT	5.311,74
5	MUSI RAWAS	6.350,10
6	MUSI BANYUASIN	14.266,26
7	BANYUASIN	11.832,99
8	OKU TIMUR	3.370,00
9	OKU SELATAN	5.493,94
10	OGAN ILIR	2.666,09
11	EMPAT LAWANG	2.256,44
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1.840,00
13	MUSI RAWAS UTARA	6.008,55
14	PALEMBANG	369,22
15	PAGAR ALAM	633,66
16	LUBUK LINGGAU	401,50
17	PRABUMULIH	251,94

Kawasan timur sampai garis pantai bagian daratan didominasi rawa-rawa dan lebak yang dipengaruhi pasang surut. Di bagian tengah dan makin ke barat merupakan dataran rendah dan lembah-lembah luas.



Bagian Barat Sumatera Selatan terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang merupakan mata rantai dari Bukit Barisan yang membentang di Pulau Sumatera mulai dari Aceh sampai Lampung. Puncak-puncak Bukit Barisan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Gunung Dempo (3,159 M) Gunung Seminung (1.954 M), Gunung Patah (2.107 M), Gunung Bungkok (2.125 M). Di kaki Gunung Seminung terdapat Danau Ranau yang luasnya 128 km² dengan panorama alam yang indah dan juga ideal untuk olahraga air seperti ski, menyelam, renang dan kano. Kawasan pegunungan dan perbukitan tersebut sebagian besar masih diselimuti hutan lebat sampai ke dataran rendah, umumnya berada pada ketinggian 900-1.200 M di atas permukaan laut. Kawasan ini juga merupakan sumber mata air utama dari sungai-sungai besar di Sumatera Selatan yang sebagian besar bermuara di Selat Bangka.

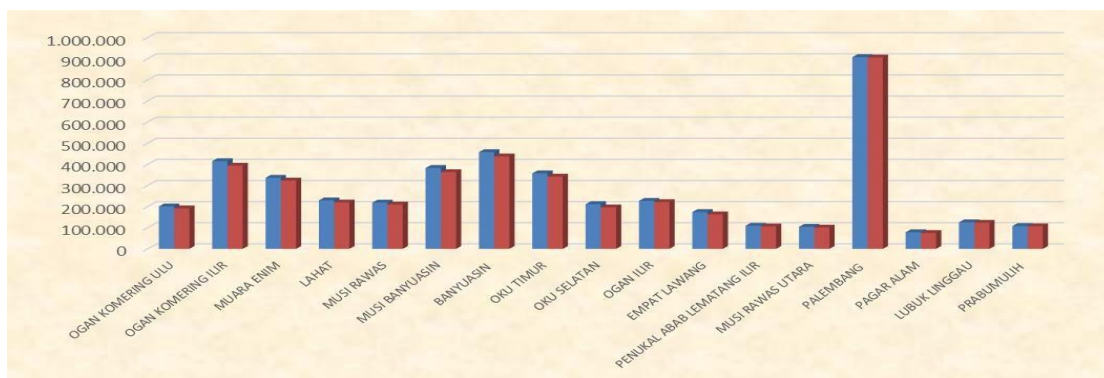
e. Informasi Umum Data Kependudukan

Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 Km² dengan jumlah penduduk Sumatera Selatan untuk Semester I Tahun 2025 (30 Juni 2025) sebanyak 9.135.317 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.650.980 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.484.337 jiwa atau dengan kata lain bahwa penduduk Sumatera Selatan didominasi dengan jenis kelamin laki-laki, demikian pula di Kabupaten/Kota. Apabila ditinjau dari jumlah penduduk, maka Kota Palembang merupakan daerah yang penduduknya terbanyak, yakni sebanyak 1.814.716 jiwa dan Kota Pagar Alam merupakan daerah yang penduduknya paling sedikit, yakni sebanyak 153.984 jiwa. Data kependudukan memegang peranan penting dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil pembangunan baik pemerintah maupun pihak lainnya terutama dunia usaha.



REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PER KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK		
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	200.981	191.668	392.649
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	415.585	394.042	809.627
3	MUARA ENIM	22	255	336.990	323.543	660.533
4	LAHAT	24	378	230.016	219.935	449.951
5	MUSI RAWAS	14	199	219.396	210.274	429.670
6	MUSI BANYUASIN	15	242	383.488	363.247	746.735
7	BANYUASIN	21	313	458.253	437.939	896.192
8	OKU TIMUR	20	312	357.783	342.544	700.327
9	OKU SELATAN	19	259	211.787	196.493	408.280
10	OGAN ILIR	16	241	227.476	221.739	449.215
11	EMPAT LAWANG	10	156	174.316	163.262	337.578
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	109.614	106.486	216.100
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	104.437	100.929	205.366
14	PALEMBANG	18	107	908.115	906.601	1.814.716
15	PAGAR ALAM	5	35	78.745	75.239	153.984
16	LUBUK LINGGAU	8	72	125.820	123.753	249.573
17	PRABUMULIH	6	45	108.178	106.643	214.821
	JUMLAH	241	3.258	4.650.980	4.484.337	9.135.317



SUMBER DATA : HASIL KONSOLIDASI DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI



Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten yakni : Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk Kota terdapat 4 (empat) Kota yaitu : Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Prabumulih. Jumlah Kecamatan pada Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 241 Kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan sebanyak 3.258 desa/kelurahan

Jumlah penduduk Sumatera Selatan untuk Semester I Tahun 2025 (30 Juni 2025) sebanyak 9.135.317 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.650.980 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.484.337 jiwa atau dengan kata lain bahwa penduduk Sumatera Selatan didominasi dengan jenis kelamin laki-laki, demikian pula pada Kabupaten/Kota. Apabila ditinjau dari jumlah penduduk, maka Kota Palembang merupakan daerah yang penduduknya terbanyak, yakni sebanyak 1.814.716 jiwa dan Kota Pagar Alam merupakan daerah yang penduduknya paling sedikit, yakni sebanyak 153.984 jiwa.

**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK
DAN KEPADATAN HASIL KONSOLIDASI
DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER I (30 JUNI 2025)**

KODE WILAYAH	KABUPATEN/ KOTA	LUAS WILAYAH (KM ²)	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK (KM ²)
1601	Ogan Komering Ulu	4.797,06	392.649	0,67	104,03
1602	Ogan Komering Ilir	18.359,04	809.627	1,07	47,43
1603	Muara Enim	7.383,90	660.533	1,04	97,66
1604	Lahat	5.311,74	449.951	0,40	103,84
1605	Musi Rawas	6.350,10	429.670	0,46	70,18
1606	Musi Banyuasin	14.266,26	746.735	1,34	51,32



1607	Banyuasin	11.832,99	896.192	0,89	73,08
1608	Oku Timur	3.370,00	700.327	0,79	205,21
1609	Oku Selatan	5.493,94	408.280	0,33	93,44
1610	Ogan Ilir	2.666,09	449.215	0,72	195,07
1611	Empat Lawang	2.256,44	337.578	0,24	151,10
1612	Penukal Abab Lematang Ilir	1.840,00	216.100	0,61	117,28
1613	Musi Rawas Utara	6.008,55	205.366	0,82	34,59
1671	Palembang	369,22	1.814.716	0,74	5.148,04
1672	Pagar Alam	633,66	153.984	0,47	246,02
1673	Lubuk Linggau	401,50	249.573	0,82	678,69
1674	Prabumulih	251,94	214.821	0,61	480,25
	Jumlah	91.592,43	9.135.317	0,78	105,28

SUMBER DATA : HASIL KONSOLIDASI DARI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)*
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,84	74,76	1,25%
2	Angka Kemiskinan	10,51	9,85	-6,28%



3	Angka Pengangguran	3,86	3,69	-4,40%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,03	5,35	6,36%
5	Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita ADHB)	75,13	80,66	7,36%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,331	0,298	-9,97%

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk antara lain :

1) Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome Urusan Pendidikan diukur 4 IKK yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	98,78%	87,95%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	66,11%	72,64
3	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	-	57,16



4	Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	-	54,57
---	---	---	-------

B. Realisasi belanja urusan pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 2.824.871.675.636 dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.868.880.713.669, dan tercapai sebesar 98,47% dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana pendidikan (toilet dan ruang kelas) masih membutuhkan peningkatan kualitas dan pemeliharaan.

2) Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome Urusan Kesehatan diukur 4 IKK yaitu sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,12	1,17
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	100

B. Realisasi belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 455.671.447.260 dari alokasi anggaran sebesar Rp 493.358.555.875, dan tercapai sebesar 92,36% dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yaitu masih didominasi oleh keterbatasan kapasitas dan mutu layanan, ditandai dengan belum meratanya daya tampung dan fasilitas rumah sakit serta keterbatasan tenaga dan sarana prasarana



3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur 7 IKK yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	4,25	130
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0	-
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	56,07	43
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0	0
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	0
6	Rasio kemantapan jalan	90,89	65,77
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100	87,43
8	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-	0



	berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi		
--	--	--	--

B. Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 967.003.732.946 dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.160.004.538.361, dan tercapai sebesar 83,36% dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
7. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
9. Program Pengembangan Permukiman
10. Program Penataan Bangunan Gedung
11. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
12. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
14. Program Pengembangan Perumahan
15. Program Kawasan Permukiman
16. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
17. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman



C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum ada SPAM Regional di Provinsi Sumatera Selatan
2. Belum ada SPALD Regional di Provinsi Sumatera Selatan

4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur 3 IKK yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	Tidak dapat dilaksanakan
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	11,40	100
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	42,16	-

B. Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 99.914.072.908 dari alokasi anggaran sebesar Rp 118.589.320.545, dan tercapai sebesar 84,25% dengan program/kegiatan sebagai berikut :



1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Pengembangan Permukiman
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
9. Program Pengembangan Perumahan
10. Program Kawasan Permukiman
11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
12. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan tidak ada kejadian bencana yang ditetapkan sebagai bencana skala provinsi oleh Kepala Daerah
2. Penanganan kawasan kumuh membutuhkan dukungan anggaran, regulasi, dan partisipasi masyarakat yang lebih kuat

5) Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dan Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat diukur 6 IKK yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	100
4	Persentase penanganan pra bencana	100	100
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100
6	Persentase penanganan pasca bencana	-	100

B. Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 57.871.214.192 dari alokasi anggaran sebesar Rp 62.095.549.892, dan tercapai sebesar 93,20% dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Penanggulangan Bencana



C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yaitu kapasitas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal karena keterbatasan personel, sarana, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

6) Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Urusan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial diukur 6 IKK yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
2	Tingkat Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
3	Tingkat Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
4	Tingkat Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	100	100
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	-	100



B. Realisasi belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 37.550.772.283 dari alokasi anggaran sebesar Rp 41.076.378.902, dan tercapai sebesar 91,42% dengan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yaitu masih terdapat penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti sosial. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya tampung panti, sarana prasarana, serta tenaga pelayanan sosial

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Nilai LPPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 memperoleh skor sebesar 3,2405 dengan status kinerja Sedang. Nilai ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024. Capaian tersebut menjadi dasar (baseline) dalam pengukuran kinerja LPPD Tahun 2025, mengingat siklus penilaian LPPD dilakukan secara ex-post atau berdasarkan kinerja tahun sebelumnya.. Dalam konteks 3 Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 perencanaan kinerja Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target Nilai LPPD sebesar 3,3 dengan kategori Sedang. Target ini disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, kesiapan perangkat daerah, serta dinamika regulasi dan kebijakan nasional terkait evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan realisasi nilai sebesar 3,2405, capaian kinerja mencapai 98,19 persen dari target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan kinerja. Perlu dijelaskan bahwa untuk LPPD Tahun 2024, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, saat ini Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 sampai dengan saat ini belum ditetapkan, karena masih dalam proses penilaian dan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 belum tersedia nilai LPPD yang bersumber dari pelaksanaan kinerja Tahun 2024. Sebagai bagian dari upaya pelaksanaan kinerja pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Penyusunan LPPD Tahun 2024 tersebut merupakan langkah strategis dan konkret dalam rangka memastikan kesinambungan siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun hingga saat ini hasil penilaian LPPD Tahun 2024 masih menunggu penetapan resmi dari Kementerian Dalam Negeri.



b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 51.A/LHP/XVIII.PLG/05/2025 tanggal 25 Mei 2025, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan penerimaannya sebesar Rp. 11.129.125.002.891,00 dan sampai akhir tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 10.064.162.585.499,30 atau 90,43%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai target yang telah ditetapkan atau 94,35%. Sebagian besar komponen PAD mencapai target yang telah ditetapkan seperti pajak daerah yang menjadi tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tercapai sebesar 102,49%, penerimaan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 107,43%, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 61,38%, dan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 63,44%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA) PROVINSI SUMATERA SELATAN S.D 31 DESEMBER 2025

URAIAN		TARGET APBD	REALISASI	(%)
PENDAPATAN DAERAH		11.129.125.002.891,00	10.064.162.585.499,30	90,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.838.287.154.591,00	4.564.918.691.338,32	94,35
A	Pendapatan Pajak Daerah	3.833.367.486.607,00	3.928.697.653.142,13	102,49
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	771.441.317.847,00	782.917.796.664,00	101,49
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	797.803.083.370,00	671.258.239.000,00	84,14
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.473.535.793.624,00	1.719.421.356.419,29	116,69
	Pajak Air Permukaan (PAP)	26.540.973.333,00	45.797.244.612,29	172,55
	Pajak Rokok	730.171.774.938,00	692.337.957.922,00	94,82
	Pajak Alat Berat (PAB)	6.000.000.000,00	-	-
	Opsen MBLB	27.874.543.495,00	16.965.058.524,55	60,86
B	Pendapatan Retribusi	5.110.991.800,00	5.490.993.411,00	107,43
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	173.213.785.434,00	106.316.886.488,21	61,38
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	826.594.890.750,00	524.413.158.296,98	63,44
PENDAPATAN TRANSFER PUSAT		6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,41
I.	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,41
	A. Dana Perimbangan	6.286.774.924.300,00	5.495.180.970.161,00	87,41
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00
A.	Pendapatan Hibah :	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00
	- Jasa Raharja	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00
TOTAL PENDAPATAN		11.129.125.002.891,00	10.064.162.585.499,30	90,43

Data Belum Audit BPK

Penerimaan pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 901.125.639.435,58 atau 8,22% dibandingkan dengan penerimaan tahun 2024, seperti tabel berikut :

Tabel
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumsel Tahun 2024 Dan 2025

No	Uraian	Realisasi		Tambah/Kurang	(%)
		2024	2025		
1	Pendapatan Asli Daerah	5.312.548.123.255,90	4.564.918.691.338,32	(747.629.431.917,58)	(14,07)
2	Pendapatan Transfer	5.648.721.133.679,00	5.495.180.970.161,00	(153.540.163.518,00)	(2,72)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.018.968.000,00	4.062.924.000,00	43.956.000,00	1,09
Jumlah Pendapatan Daerah		10.965.288.224.934,90	10.064.162.585.499,30	(901.125.639.435,58)	(8,22)

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	11.129.125.002.891,0 0	10.064.162.585.499,30	90,43	10.965.288.224.934,90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.838.287.154.591,0 0	4.564.918.691.338,32	94,34	5.312.548.123.255,90
4.1.01	Pajak Daerah	3.833.367.486.607,00	3.928.697.626.142,13	102,48	4.744.701.180.376,87
4.1.02	Retribusi Daerah	5.110.991.800,00	5.490.993.411,00	107,43	8.225.836.940,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	173.213.785.434,00	106.316.886.488,21	61,37	138.824.929.544,35
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	826.594.890.750,00	524.413.185.296,98	63,44	420.796.176.394,68
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.838.287.154.591,0 0	4.564.918.691.338,32	94,34	5.312.548.123.255,90
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.286.774.924.300,0 0	5.495.180.970.161,0 0	87,40	5.648.721.133.679,0 0
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	5.642.095.592.679,0 0
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	2.645.802.349.840,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.806.673.215.634,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	236.102.516.086,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	953.517.511.119,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.329.910.647.300,00	2.480.132.510.400,00	74,48	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.765.321.372.000,00	1.830.641.652.620,00	103,70	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.185.053.612.000,00	1.177.917.514.141,00	99,39	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	6.280.285.631.300,0 0	5.488.691.677.161,0 0	91,26	5.642.095.592.679,0 0
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.489.293.000,00	6.489.293.000,00	100,00	6.625.541.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	6.489.293.000,00	6.489.293.000,00	100,00	6.625.541.000,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	6.286.774.924.300,0 0	5.495.180.970.161,0 0	87,40	5.648.721.133.679,0 0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00	4.018.968.000,00
4.3.01	Pendapatan	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00	4.018.968.000,00



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	Hibah				
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.062.924.000,00	4.062.924.000,00	100,00	4.018.968.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.129.125.002.891,00	10.064.162.585.499,30	90,43	10.965.288.224.934,90
5	BELANJA DAERAH	11.237.619.654.098,00	9.690.237.627.574,89	86,23	10.908.424.497.431,90
5.1	BELANJA OPERASI	5.871.201.714.734,00	5.244.601.274.731,23	89,32	5.308.864.484.748,94
5.1.01	Belanja Pegawai	3.039.234.426.438,00	2.818.913.305.275,00	92,75	2.529.375.704.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.156.911.406,00	2.116.245.294.647,23	87,15	2.205.615.578.219,94
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.786.684.555,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	402.510.376.890,00	309.442.674.809,00	76,87	561.105.467.074,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	9.981.050.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.871.201.714.734,00	5.244.601.274.731,23	89,32	5.308.864.484.748,94
5.2	BELANJA MODAL	1.563.653.825.172,00	1.327.146.154.482,36	84,87	1.303.072.011.451,71
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.819.000.000,00	1.336.164.000,00	34,98	701.091.453,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	352.274.664.866,00	298.998.222.053,00	84,87	272.576.659.179,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	279.346.525.609,00	252.573.109.777,36	90,41	260.181.034.813,71
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	848.422.192.332,00	703.198.894.988,00	82,88	699.678.969.706,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.731.188.000,00	66.409.406.979,00	90,06	96.149.063.496,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.060.254.365,00	4.630.356.685,00	76,40	3.785.192.804,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.563.653.825.172,00	1.327.146.154.482,36	84,87	1.303.072.011.451,71
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.144.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.144.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	29.144.517.180,00	33.448.110,00	0,11	82.301.295,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.773.619.597.012,00	3.118.456.750.251,30	82,63	4.296.405.699.936,25
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.048.080.940.377,00	1.906.130.908.101,00	93,06	2.399.428.901.098,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah	1.667.538.656.635,00	1.155.245.842.150,30	69,27	1.896.976.798.838,25



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	Provinsi ke Kabupaten/Kota				
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.000.000.000,00	57.080.000.000,00	98,41	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	3.773.619.597.012,00	3.118.456.750.251,30	82,63	4.296.405.699.936,25
	JUMLAH BELANJA	11.237.619.654.098,00	9.690.237.627.574,89	86,23	10.908.424.497.431,90
	SURPLUS/DEFISIT	(108.494.651.207,00)	373.924.957.924.43	(344,64)	56.863.727.503,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	108.494.651.207,00	108.494.651.207.36	100,00	51.630.923.704,36
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	108.494.651.207.36	100,00	154.808.628.910,91
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.494.651.207,00	108.494.651.207.36	100,00	154.808.628.910,91
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00	108.494.651.207.36	100,00	154.808.628.910,91
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0,00	103.177.705.206,55
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0.00	0.00	0,00	103.177.705.206,55
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0,00	103.177.705.206,55
	PEMBIAYAAN NETTO	108.494.651.207,00	108.494.651.207.36	100,00	51.630.923.704,36
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	482.419.609.131,79	0,00	108.494.651.207,36

5. Inovasi Daerah

Berdasarkan database Inovasi Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Inovasi Daerah sebagai berikut :



DAFTAR INOVASI DAERAH TAHUN 2025
(INOVASI PELAYANAN PUBLIK, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN
INOVASI LAINNYA) PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Biro Humas Protokol Setda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Strategi Peningkatan Kehumasan melalui Penerapan Website Publikasi Pimpinan dalam Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumsel
2	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Standarisasi Keputusan Gubernur melalui Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur
3	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Informasi Produk Hukum Daerah melalui Website pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
4	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penataan dan Pencatatan Arsip Surat Secara Digital di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel
5	BPKAD Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aplikasi SIAP SUMSEL
6	BPKAD Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Aplikasi E-BKBK



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Daerah	
7	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitalisasi Layanan Usul Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Struktural dan Fungsional Umum menggunakan QR Code di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
8	Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitalisasi Penyebarluasan Informasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Sumatera Selatan
9	BPSDM Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Efektivitas Platform Digital Penjadwalan dan Registrasi Diklat Teknis Umum melalui QR Barcode pada BPSDMD Provinsi Sumsel
10	BPSDM Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem Informasi Pendaftaran Diklat (SIP Diklat)
11	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Reposisi Peran Widyaiswara dari Instruktur ke Fasilitator Inovasi dalam Peningkatan Kompetensi ASN Melalui WI-LAB (Widyaiswara Innovation Laboratory)



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
12	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Koordinasi Penguatan Koordinasi dan Sinergi melalui Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada di Provinsi Sumatera Selatan
13	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Penanganan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dalam rangka Ketertiban Umum di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
14	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Edukasi Kepatuhan Hukum Bagi Para Pelajar SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan
15	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Kerjasama Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Program Pacak Beres (Pelayanan Cepat Penyelamatan Non Kebakaran dan Bantuan Evakuasi Reptil serta Emergensi)
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Daerah	melalui Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Efektivitas Manajemen Data dan Pelaporan Satgas Linmas di Provinsi Sumatera Selatan
18	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Edukasi Tertib Pelajar SMA/SMK di Provinsi Sumatera Selatan
19	Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumsel melalui Penggunaan Zoom Meeting
20	Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemanfaatan Pemusnahan Arsip tanpa Asap (Mutas) untuk Pupuk Organik Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel
21	Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Efisiensi Akuisisi Arsip Statis melalui Implementasi SOP dan Monitoring Berbasis Sistem pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
22	Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Preservasi dengan Autentikasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
23	Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Optimalisasi Pembinaan Kearsipan Perusahaan Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumsel melalui Pendampingan Penataan Arsip
24	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem Pengelolaan dan Pengarsipan Data Perencanaan (Sepedaan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
25	Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Simponi Alkes Sumsel sebagai Sistem Pengawasan Alat Kesehatan di Provinsi Sumsel
26	Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	QR Code Instan Evaluation : Revolusi Penanganan Keluhan Peserta Pelatihan di Bapelkes Provinsi Sumsel
27	Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Terobosan Eliminasi TBC
28	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan	Setetes Embun (Sejarah teka teki silang, evaluasi menarik belajar uji kemampuan)



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	
29	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Utang Rani (Ular tangga kebugaran jasmani)
30	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Inovasi Pengolahan kaldu kepala ikan sebagai produk bernilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengurangi limbah perikanan
31	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Inovasi briket berbahan ampas tebu dan kulit jagung sebagai alternatif bahan bakar energi baru terbarukan
32	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan	Tehvolution : Revolusi hijau dari ampas menuju pangan nasional



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		yang menjadi kewenangan Daerah	
33	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Implementasi augmented reality sebagai alat peraga pada materi sistem organ tubuh manusia
34	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	LINUNA (Lingkaran penuh makna)
35	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Logisfera : Prototipe media pembelajaran geometri digital interaktif berbasis web
36	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Perancangan Website 'Monologend Sriwijaya' sebagai inovasi game edukasi untuk melestarikan Sejarah Kerajaan dan tokoh legenda sriwijaya



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		kewenangan Daerah	
37	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Balm Herbal (Anti gatal berbahan dasar kunyit, daun sirih dan pandan)
38	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Bioheal Patch (Plester luka biodegradable berbasis pelepah pisang dan ekstrak biji rami)
39	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Herba Spray (Spray anti nyamuk dari bahan herbal serai, kulit jeruk dan daun pandan)
40	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	Mangflax Healing Gel (Gel herbal penyembuh luka ringan berbasis daun mangga muda dan biji rami)



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Daerah	
41	Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Program Penanggulangan Gangguan Refraksi Bagi Siswa (PENGGARIS)
42	RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bridging E-BLUD dan Bank Sumsel Babel dalam Penatausahaan Keuangan BLUD
43	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Strategi Penerapan Hukum Lingkungan dengan Sanksi Administratif dan Denda Administratif Bagi Pencemar (Usaha/Kegiatan) di Provinsi Sumsel
44	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kajian Penetapan Kelas Air Sungai dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
45	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	Digitalisasi Inventarisasi Data dan Laporan Pengguna Pembangkit Tenaga Listrik (Genset) untuk Kepentingan sendiri dengan Google Forms



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Daerah	
46	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inventarisasi Data Perizinan IUPTLS melalui Digitalisasi pada Regional VI Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel
47	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem Monitoring dan Pemanfaatan PLTS Atap untuk Efisiensi Energi di Gedung Pemerintahan
48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Inventarisasi Pengawasan dan Pengendalian Izin Ketenagalistrikan melalui Teknologi Berbasis Website pada Cabang Dinas Regional III Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel
49	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pengaturan, Penggunaan dan Pemeliharaan Semua Aset/Barang Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak pada Cabang Dinas Regional II
50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Akselerasi Pelaporan Volume Lifting Minyak dan Gas Bumi Berbasis Teknologi Informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
51	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Manajemen Energi Berbasis Perubahan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Program E-Smart (Energy Saving Management and Responsible Team Work) di Kantor Cabang Dinas Regional 3 Dinas ESDM Provinsi Sumsel
52	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Database Potensi Energi Baru Terbarukan pada Cabang Dinas Regional IV
53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Program melalui Penyediaan Ruang Konsultasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel
54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMD Air Minum di Provinsi Sumsel menuju Berkinerja Sehat
55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengembangan Pelayanan Informasi Bidang Perumahan melalui Website "Housing Clinic" di UPTD PIP2B dan Jakon Disperkim Provinsi



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Sumsel
56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengadaan Database Koordinasi Pokja PKP dan Forum PKP dalam rangka Mewujudkan Terciptanya Kolaborasi Efektif Penataan Kawasan Kumuh secara Tuntas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel
57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem informasi cepat dan pintar (SICETAR) untuk pencatatan pembayaran melalui QR code dan ID Unik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bangun Unggul Digitalisasi Infrastruktur terintegrasi Dengan sistem informasi SIBIJAK
59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pendataan Kawasan Kumuh melalui metode GiS
60	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Hidrologi pada UPTB Balai PSDA Wilayah Sungai Sugihan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Provinsi Sumsel
61	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pengawasan Konstruksi Irigasi dan Rawa pada Dinas PSDA Provinsi Sumsel
62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Layanan Perizinan untuk Publik di Sumatera Selatan Sinergi Ajak Perizinan Awal (Laksan Sapa)
63	BRIDA Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Tiket Masuk Pengunjung secara Digital di UPTB Kebun Raya Sriwijaya pada Balitbangda Provinsi Sumsel
64	BRIDA Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Modifikasi Mesin Chopper Rumput di UPTB STP Sumsel
65	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Koperasi melalui SOP Pemeriksaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi
66	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Legalitas Koperasi melalui E-Pendampingan OSS Perizinan Berusaha KSP/USP pada



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Dinas Koperasi dan IKM Provinsi Sumsel
67	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan melalui Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan Ramah Lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan
68	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Perikanan Tangkap melalui Pendampingan ke Pelaku Usaha
69	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Target dan Capaian Kinerja dengan menggunakan data yang valid dan aktual pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel 2025-2029
70	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pengelolaan Data dalam rangka Percepatan Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
71	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan	Produksi Pakan Mandiri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Patin di



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		yang menjadi kewenangan Daerah	Sumatera Selatan (Patin Prima)
72	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Fasilitas Perizinan Berusaha melalui Pojok Sarana Informasi dan Konsultasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Pojok Serasan)
73	Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitalisasi Timbang Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api
74	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Penataan dan Pengelolaan Bengkel Brigade Alat dan Mesin Pertanian
75	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitalisasi Database Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pascapanen Hortikultura Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
76	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Inovasi Tata Kelola	Pentas siTepat (Sistem Informasi Terpadu Tanaman



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	dan Hortikultura Provinsi Sumsel	Pemerintahan Daerah	Pangan dan Hortikultura)
77	Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitalisasi Pelayanan Perlindungan Tanaman Perkebunan melalui Silat Perkasa di UPTD BPTP Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
78	Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pengawasan Peredaran Benih Kelapa Sawit melalui Tim Optimalisasi Pengawasan pada UPTD BPSBTP Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
79	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelestarian Naskah Kuno melalui Alih Media (Digitalisasi) pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel
80	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Bahan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel
81	Dinas Sosial Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Keterampilan Anak membutuhkan Perlindungan Khusus melalui Praktik Magang di Bengkel Motor pada Dinas Sosial Provinsi Sumsel
82	Dinas	Inovasi Tata	Peningkatan Layanan Pusat



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel	Kelola Pemerintahan Daerah	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
83	Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sinergi Strategis Dinas Perindustrian dan Dekranasda Sumsel untuk Pemberdayaan IKM Batik Berbasis Inovasi dan Promosi
84	Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitasi Arsip Keuangan dalam rangka peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
85	Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Database Jejaring Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah Sumatera Selatan (Tajung IKM Sumsel)
86	Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Layanan Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Call Center di UPTD Industri Pangan dan Tekstil Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
87	Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Layanan Khusus Kawasan Peruntukan Industri melalui Program Penguatan Sosialisasi



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri di Sumatera Selatan
88	Bappeda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi melalui Penyediaan Server Data Terpusat untuk mendukung Efektivitas Tata Kelola Perencanaan di Bappeda Provinsi Sumsel
89	Bappeda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Implementasi Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 102 Ayat 2 Tentang Mekanisme Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah RKPD Bagi Kabupaten/Kota Beserta Pedoman Pelaksanaan dalam Pengawasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota dengan Indikator Provinsi pada Bappeda Provinsi Sumsel
90	Bappeda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Peran Forum Konsultasi Daerah dalam Percepatan Transformasi Ekonomi Provinsi Sumsel
91	Bappeda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan Implementasi Kinerja Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Daerah	Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim pada Bappeda Provinsi Sumsel
92	Bappeda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelarasan Indikator Makro Pembangunan Antar Dokumen Perencanaan
93	Bappeda Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sistem Informasi Alokasi Pendanaan Tanggung Jawab Korporasi (SIAPTANJAK)
94	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Implementasi Website Norma 100 untuk Peningkatan Kepatuhan Regulasi Ketenagakerjaan pada Badan Usaha di Sumatera Selatan
95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Kapasitas Organisasi Serikat Pekerja Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis di Provinsi Sumsel
96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan Data melalui Digitalisasi Dokumen Hukum Administrasi Penempatan Transmigran pada Dinaskertrans Provinsi Sumsel



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitalisasi Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
98	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Persiapan Lembaga Pelatihan Kerja dalam Memenuhi 8 Standar Akreditasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
99	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
100	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Populasi dan Perbaikan Mutu Genetik Ternak Sapi di Provinsi Sumsel melalui Inseminasi Buatan Mandiri
101	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan (PPTPPP) Melalui Pemeliharaan Ayam Kastari di Dinas Ketahanan Pangan dan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
102	BPBD Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik	GERCEP-BANA (Gerak Cepat Bantuan Bencana)
103	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
104	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Kolaborasi Dinas dengan Komunitas di Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Sistem Perlindungan terhadap Anak
105	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Teknologi Pengolahan Produk Nipah menjadi tepung free gluten yang bernilai ekonomi tinggi di Kelompok Wanita Tani (KWT) Bintang Batu Kecamatan Tulung Selapan di UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur
106	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengembangan Produk Silvofishery di Hutan kemasyarakatan (HKM) di UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
107	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digitalisasi Pelaporan Patroli di UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah
108	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengembangan Ekowisata dan Agrosilvopastura di Kelompok Tani Hutan (KTH) Enau Anggun Lestari di UPTD KPH Wilayah XII Benakat
109	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pembibitan dan Edukasi Pusat Lebah di UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong
110	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sitem informasi Akses Lahan untuk Masyarakat (SI ALAM)
111	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pembinaan masyarakat Kelompok Tani Hutan bersama lembaga penelitian ICRAF, Praktik” Perselisihan Lahan Kelompok Tani Hutan Cerdas Iklim” kerja sama dengan ICRAF di UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis
112	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Permainan Edukatif Berbasis Miniatur Lanskap di



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis
113	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Pohon Asuh di Hutan Adat Mude Ayek Tebat Benawa di UPTD KPH Wilayah X Dempo

6. Penutup

Selaku Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami telah berupaya melaksanakan seluruh tugas dan kewenangan yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arah kebijakan yang telah digariskan. Upaya tersebut tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan sinergi yang solid dari seluruh Badan, Dinas, Biro, dan Kantor di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan, menunjukkan berbagai capaian yang menggembirakan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 secara umum memperlihatkan adanya perkembangan, kemajuan, dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh upaya dan capaian tersebut pada hakikatnya merupakan hasil kerja bersama dan ditujukan sepenuhnya bagi kepentingan serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan masih dijumpai sejumlah kendala dan keterbatasan.



Meskipun pada umumnya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan, berbagai hambatan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga guna penyempurnaan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta kontribusi nyata selama Tahun 2025. Dukungan tersebut telah menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi kami untuk terus bekerja keras, disertai dengan komitmen dan dedikasi dalam mengemban amanah pengabdian kepada masyarakat, daerah, dan bangsa.

Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran, masukan, koreksi, dan kritik yang konstruktif, khususnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. Seluruh masukan tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai.

Akhir kata, marilah kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua, yaitu Sumatera Selatan yang mampu memberikan kesejahteraan secara adil dan merata bagi seluruh warganya melalui percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian dan pembangunan daerah ke depan. Amin.



**DAFTAR PENGHARGAAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Nama Negara/Instansi yang Memberikan
1	Piagam Kharisma Event Nusantara (KEN) atas keberhasilan Sumsel dalam menyelenggarakan event-event berskala nasional yang berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah	16 Mei 2025	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
2	Penghargaan kepada Provinsi Sumsel sebagai Provinsi dengan seluruh Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	12 Juni 2025	Menteri Kesehatan RI
3	Piagam atas Capaian Provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mewujudkan pembentukan 100% pos bantuan hukum (Posbankum) di 3.258 (seluruh) desa/kelurahan di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel.	28 Juli 2025	Menteri Hukum RI
4	Piagam Rekor atas Capaian Provinsi pertama yang membentuk Posbankum di seluruh desa/kelurahannya.	28 Juli 2025	Museum Rekor Indonesia (MURI)
5	Penghargaan kepada Gubernur Sumsel atas komitmennya dalam mendukung kesetaraan Perempuan Provinsi Sumsel.	30 Juli 2025	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Selatan
6	Pemberian Gelar Adat Pelinggih Agung	04 Agustus	Komunitas Hindu



No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Nama Negara/Instansi yang Memberikan
	Prajuru Utama Dharma Negara Haji I Wayan sebagai bentuk penghargaan atas komitmennya menjaga nilai-nilai kebhinekaan dan harmoni sosial	2025	Bali
7	Penghargaan kepada pemprov Sumsel atas inisiasi dan Dedikasi Gubernur Sumsel sebagai Kepala Daerah pertama di Indonesia yang melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Secara Serentak antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang.	20 Agustus 2025	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Dirjen Badilag MA) RI
8	Penghargaan sebagai Pelopor dan Peletak Pondasi Dasar Pembangunan serta Percepatan Meritokrasi Instansi Daerah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.	10 September 2025	Kepala BKN RI
9	Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pelatihan AI terbesar di dunia dengan jumlah peserta mencapai 25.000 guru	20 September 2025	Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)
10	Penghargaan kepada Gubernur Sumsel atas Asia Best Innovative of Indonesia 2025 dalam Ajang Asia Global Award 2025	17 Oktober 2025	Seven Media Asia
11	Penghargaan Pesantren Award 2025 kepada Gubernur Sumsel sebagai Kepala Daerah Peduli Pesantren	20 Oktober 2025	Kementerian Agama RI



No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Nama Negara/Instansi yang Memberikan
	dengan kategori “Pemimpin Daerah Penggerak Pesantren”.		
12	Penghargaan Kepada Provinsi Sumatera Selatan atas Upaya dalam Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Kemandirian pangan di Tingkat SMA/SMK	23 Oktober 2025	Badan Pangan Nasional
13	Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Brida/Bapperida Optimal 2025 indikator Optimaliasasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah “Pengelolaan Kebun Raya Daerah Berbasis Riset”	27 Oktober 2025	Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
14	Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi dengan Penurunan Prevalensi Stunting Terbaik II Nasional per 12 November 2025	12 November 2025	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI
15	Penghargaan People of The Year 2025 dalam Kategori Pemberdaya Pangan dan Petani Lokal, subkategori Diversifikasi Produksi Pangan Lokal diselenggarakan oleh Metro TV	28 November 2025	METRO TV
16	Penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2025	28 November 2025	Bank Indonesia



No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Nama Negara/Instansi yang Memberikan
	Kawasan Sumatera		
17	Penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik Kawasan Sumatera 2025	28 November 2025	Bank Indonesia
18	Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi Terbaik kategori Fiskal Sedang dalam Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan pada Penganugerahan Daerah Berprestasi	01 Desember 2025	Kementerian Dalam Negeri RI
19	Penghargaan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai Bapak Pariwisata	04 Desember 2025	Asosiasi Pelaku Wisata Indonesia (ASPPI).
20	Penghargaan Naker Award Inspirational Leadership Tahun 2025 Kategori Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Besar Terbaik Ketiga	08 Desember 2025	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
21	Penghargaan Naker Award Inspirational Leadership Tahun 2025 Kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik. Penghargaan ini diberikan atas program-program efektif seperti job fair skala besar dan berhasil menyerap lulusan SMK, termasuk ke luar negeri.	08 Desember 2025	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
22	Penghargaan Anugerah Innovative	10 Desember	Kementerian



No.	Nama Penghargaan	Tanggal	Nama Negara/Instansi yang Memberikan
	Government Award (IGA) Tahun 2025 sebagai Provinsi Terinovatif Tingkat Nasional dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri	2025	Dalam Negeri RI
23	Penghargaan Khusus Pembangunan Daerah Tahun 2025 kepada Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Terbaik IV Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi	15 Desember 2025	Bappenas
24	Penghargaan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kepada Provinsi Sumatera Selatan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi "Informatif" dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada kategori Pemerintah Provinsi.	15 Desember 2025	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
25	Penghargaan kepada Gubernur Sumsel sebagai Tokoh Peduli Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, dan Wirausaha Muda di Sumatera Selatan	26 Desember 2025	DPD IMM Sumsel

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025

merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Ringkasan ini memuat capaian kinerja utama, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dokumen ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serta referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan